PENGERTIAN DAN PENGGUNAAN ISTILAH OLIGARKI



PENGERTIAN

Pola kekuasaan ketika sumber daya yang terkonsentrasi memberi kelompok kecil pengaruh berulang dan tidak seimbang atas keputusan kolektif serta perlindungan kepentingan material.

EMPAT PERTANYAAN DIAGNOSTIK

1. **Konsentrasi sumber daya:** siapa menguasai kekayaan, aset, atau akses strategis?
2. **Konversi pengaruh:** bagaimana sumber daya diterjemahkan menjadi pengaruh politik?
3. **Penyeimbang:** apakah hukum, media, parlemen, dan masyarakat dapat mengoreksi?
4. **Persistensi:** apakah keuntungan dan pengaruh yang sama terus berulang?

KANAL PENGARUH

- Pembiayaan politik
- jaringan patronase
- kepemilikan media
- akses kebijakan dan regulasi

PEMBEDAAN ISTILAH

Oligarki tidak otomatis sama dengan elite, plutokrasi, otoritarianisme, korupsi, atau ketimpangan.

KONTEKS INDONESIA

Dari Orde Baru ke demokrasi elektoral: sebagian jaringan beradaptasi; pemilu dan masyarakat tetap menjadi arena kontestasi.

PESAN UTAMA

Jangan berhenti pada label. Tunjukkan aktor, mekanisme pengaruh, bukti, dan dampaknya.

Pengertian dan Penggunaan Istilah OLIGARKI

Prof. Ir. Rudy C. Tarumingkeng, PhD
www.rudyct.com/cv.pdf

IBM-ASMI | RudyCT Academic Series

Artikel konseptual tentang makna, perkembangan, indikator, dan pemakaian istilah oligarki dalam analisis sosial-politik

Abstract

This article explains the meaning and analytical use of the term oligarchy. It traces the concept from its Greek roots and Aristotle's distinction between rule by a few and rule by the wealthy, to modern approaches that focus on concentrated material power and the defense of wealth. The article distinguishes oligarchy from elite, plutocracy, authoritarianism, kleptocracy, and ordinary inequality; these concepts can overlap, but they are not interchangeable. It then examines oligarchic mechanisms in political institutions, markets, media, parties, and public policy, with particular attention to Indonesia's historical transition from the New Order to electoral democracy. The article proposes a cautious diagnostic framework based on concentration of resources, conversion of economic power into political influence, weak countervailing institutions, and persistent advantages in policy outcomes. It also discusses methodological limits: the label must be supported by evidence and should not be used as a substitute for causal explanation. The central argument is that oligarchy is best understood as a pattern of concentrated power and wealth protection that can operate under different formal regimes, including electoral democracy. Democratic quality therefore depends not only on elections but also on whether citizens and institutions can constrain private power and secure fair access to political voice and economic opportunity.

Abstrak

Artikel ini menguraikan pengertian dan penggunaan istilah oligarki sebagai konsep dalam ilmu politik, sosiologi, dan ekonomi politik. Pembahasan dimulai dari akar kata Yunani dan pemikiran Aristoteles, lalu beralih ke teori modern yang menekankan konsentrasi kekayaan, kemampuan mengubah sumber daya material menjadi pengaruh politik, serta upaya melindungi kepentingan pemilik kekayaan. Oligarki dibedakan dari elite, plutokrasi, otoritarianisme, kleptokrasi, dan ketimpangan, meskipun dalam praktiknya konsep-konsep tersebut dapat beririsan. Artikel membahas mekanisme pengaruh dalam partai, pemilu, kebijakan publik, pasar, media, dan institusi hukum; memberi perhatian pada perubahan politik Indonesia dari Orde Baru menuju demokrasi elektoral; serta menawarkan kerangka diagnosis yang menguji konsentrasi sumber daya, konversi kekayaan menjadi pengaruh, lemahnya penyeimbang, dan persistensi keuntungan kebijakan. Kesimpulan utama ialah bahwa oligarki bukan semata-mata nama bagi sekelompok orang kaya, melainkan pola relasi kekuasaan ketika sumber daya yang sangat terkonsentrasi memberi kemampuan yang tidak seimbang untuk membentuk keputusan kolektif dan mempertahankan kekayaan. Karena itu, penggunaannya memerlukan indikator dan bukti, bukan sekadar retorika.

Kata Kunci

oligarki; kekuasaan; konsentrasi kekayaan; demokrasi; ekonomi politik; Indonesia; akuntabilitas

1. Pendahuluan: Mengapa Istilah Oligarki Penting

Dalam percakapan sehari-hari, istilah oligarki sering muncul ketika publik membicarakan hubungan antara kekayaan, kekuasaan politik, dan kebijakan negara. Istilah itu dipakai untuk menilai dominasi pengusaha besar, dinasti politik, pemilik media, kelompok yang dekat dengan pemerintah, atau jaringan yang dianggap menentukan keputusan penting. Pemakaian yang luas menunjukkan bahwa masyarakat merasakan adanya jarak antara prinsip

kesetaraan politik dan distribusi pengaruh yang nyata. Namun, semakin sering sebuah kata digunakan, semakin besar pula risiko maknanya menjadi kabur. Seseorang dapat disebut oligark hanya karena kaya, berpengaruh, atau tidak disukai; pemerintah dapat disebut oligarkis hanya karena kebijakannya kontroversial. Cara seperti itu melemahkan analisis karena kesimpulan sudah hadir sebelum bukti diperiksa.

Artikel ini menempatkan oligarki sebagai konsep analitis, bukan sebagai caci maki politik. Tujuannya ialah menjelaskan apa yang dimaksud dengan oligarki, kapan istilah itu berguna, bagaimana membedakannya dari konsep yang berdekatan, dan bukti apa yang layak digunakan untuk menyimpulkan adanya pengaruh oligarkis. Pertanyaan pokoknya bukan hanya "siapa yang kaya?" atau "siapa yang sedang berkuasa?", melainkan bagaimana sumber daya terkonsentrasi diterjemahkan menjadi kemampuan memengaruhi aturan, agenda, pelaksanaan kebijakan, dan hasil sosial secara berulang.

Perhatian terhadap oligarki memiliki arti praktis bagi tata kelola. Dalam masyarakat demokratis, warga pada dasarnya memiliki suara politik yang setara melalui hak pilih. Namun, kemampuan untuk mengakses pembuat keputusan, membentuk opini publik, mendanai organisasi, menguasai informasi, menanggung biaya litigasi, atau bertahan dalam persaingan ekonomi tidak terbagi sama rata. Jika perbedaan sumber daya tersebut terus-menerus menghasilkan ketimpangan pengaruh, maka kesetaraan formal dapat berjalan berdampingan dengan ketidaksetaraan substantif. Analisis oligarki membantu menguji keadaan itu tanpa menganggap bahwa setiap ketimpangan otomatis merupakan oligarki.

Alur pembahasan terdiri atas empat langkah. Pertama, istilah ini diletakkan dalam sejarah pemikiran politik. Kedua, teori modern dan perbedaan konsep dijelaskan. Ketiga, mekanisme oligarkis dibahas dalam lembaga demokrasi dan perekonomian, dengan perhatian khusus pada Indonesia. Keempat, artikel menyusun panduan penggunaan istilah yang operasional, etis, dan dapat diteliti. Kerangka tersebut dimaksudkan bagi mahasiswa, dosen,

peneliti, jurnalis, dan pembuat kebijakan yang memerlukan bahasa yang tepat untuk membahas konsentrasi kekuasaan.

2. Asal Kata dan Jejak Pemikiran Klasik

Kata oligarki berasal dari bahasa Yunani oligoi, yang berarti sedikit atau beberapa, dan arche, yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Secara etimologis, oligarki sering diterjemahkan sebagai "pemerintahan oleh sedikit orang". Pengertian awal ini menekankan jumlah penguasa: keputusan kolektif berada di tangan kelompok kecil, bukan seluruh warga. Akan tetapi, sejarah pemikiran politik segera memperlihatkan bahwa jumlah bukan satu-satunya unsur yang menentukan. Kelompok kecil dapat memerintah atas nama kepentingan umum, atau mengarahkan kekuasaan untuk keuntungan kelompoknya sendiri.

Aristoteles mengembangkan klasifikasi bentuk pemerintahan yang membedakan satu, sedikit, dan banyak penguasa sekaligus mempertimbangkan tujuan kekuasaan. Dalam skema umumnya, pemerintahan oleh sedikit orang yang mengejar kebaikan bersama disebut aristokrasi; bentuk yang menyimpang, ketika kelompok kecil menggunakan jabatan bagi kepentingannya sendiri, disebut oligarki. Aristoteles juga mengamati bahwa dalam praktik, kelompok yang memerintah dalam oligarki biasanya orang kaya, sementara demokrasi sering dikaitkan dengan kekuasaan kelompok yang lebih miskin. Dengan demikian, perbedaan kelas dan distribusi kekayaan menjadi bagian penting dari definisi politiknya (Aristotle, 1998; Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2022).

Bagi Aristoteles, konflik antara kaya dan miskin bukan sekadar perbedaan pendapatan, melainkan persaingan tentang siapa yang berhak menentukan aturan dan untuk tujuan siapa negara bekerja. Orang kaya dapat berpendapat bahwa kontribusi harta memberi mereka hak politik lebih besar; orang miskin dapat menekankan bahwa status sebagai warga yang bebas memberi hak setara. Persoalannya ialah ketika satu kelompok mengubah keunggulan

ekonominya menjadi klaim dominasi politik. Karena itu, dalam gagasan konstitusi campuran, kelas menengah yang luas dipandang sebagai penyangga terhadap polarisasi ekstrem antara kekayaan dan kemiskinan.

Dalam bahasa modern, "pemerintahan oleh sedikit orang" dapat mencakup rezim yang secara resmi membatasi jabatan kepada suatu kelompok, tetapi oligarki tidak selalu hadir sebagai konstitusi yang secara terbuka mengakui hak istimewa. Ia juga dapat menjadi pola kekuasaan informal di dalam institusi yang secara legal menyatakan kesetaraan. Aturan pemilu mungkin universal, tetapi sumber pendanaan dan akses kampanye tidak setara. Pasar mungkin terbuka secara formal, tetapi lisensi, modal, jaringan, atau informasi dikuasai oleh beberapa pemain. Fokus analisis kemudian berpindah dari teks konstitusi saja kepada hubungan nyata antara kekayaan dan kuasa.

Sejarah gagasan ini mengajarkan dua pelajaran. Pertama, oligarki sejak awal memiliki dimensi deskriptif tentang konsentrasi pemerintahan dan dimensi normatif tentang penggunaan kekuasaan bagi kepentingan sempit. Kedua, hubungan antara kekayaan dan kekuasaan bukan tambahan yang kebetulan, melainkan salah satu pusat persoalan. Namun, definisi klasik tidak boleh dipindahkan begitu saja ke masyarakat modern yang memiliki negara besar, birokrasi profesional, partai massa, media digital, dan ekonomi global. Teori kontemporer perlu menjelaskan bagaimana pengaruh dapat dijalankan tanpa seorang oligark secara langsung memegang jabatan tertinggi.

3. Perkembangan Konsep Oligarki Modern

Pada abad ke-20, konsep oligarki digunakan untuk menganalisis organisasi dan pemerintahan yang secara formal demokratis tetapi cenderung dikuasai pimpinan kecil. Robert Michels merumuskan "hukum besi oligarki" melalui studi organisasi politik dan gerakan massa. Menurut argumennya, organisasi besar membutuhkan spesialisasi, pembagian kerja, kepemimpinan, dan penguasaan informasi. Para pemimpin memperoleh keunggulan karena mengendalikan keterampilan organisasi serta saluran komunikasi. Seiring

waktu, kepemimpinan dapat berubah menjadi lapisan yang mempertahankan posisinya, bahkan ketika tujuan awal organisasi bersifat demokratis (Michels, 1962).

Gagasan Michels tidak berarti setiap organisasi pasti menjadi oligarki dengan cara yang sama, atau bahwa demokratisasi tidak mungkin. Nilai analitisnya terletak pada peringatan bahwa struktur yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama dapat menciptakan ketimpangan kendali. Pengurus serikat, partai, universitas, asosiasi profesi, atau perusahaan dapat memusatkan informasi dan kewenangan sehingga anggota biasa kesulitan memeriksa keputusan. Karena itu, konsep oligarki juga digunakan di luar negara dan kelas pemilik modal, terutama ketika organisasi kecil memonopoli keputusan di dalam lembaga.

Dalam teori kontemporer, Jeffrey A. Winters menawarkan definisi material yang berpengaruh: oligarki merujuk pada politik pertahanan kekayaan oleh aktor-aktor yang memiliki kekayaan terkonsentrasi. Pusat analisisnya bukan semata-mata jabatan formal atau identitas sosial para pelaku, melainkan kapasitas material untuk melindungi dan memperbesar kekayaan ketika berhadapan dengan ancaman politik. Winters membandingkan bentuk oligarki dalam berbagai konteks sejarah, termasuk oligarki bersenjata, penguasa, sultanistik, dan sipil. Perbedaan bentuk itu menunjukkan bahwa strategi perlindungan kekayaan dapat berubah sesuai kapasitas negara, struktur hukum, dan lingkungan politik (Winters, 2011).

Kerangka Winters membantu menjelaskan mengapa oligark tidak harus duduk di kabinet, menjadi legislator, atau menguasai partai secara langsung. Mereka dapat bekerja melalui pengaruh terhadap pembiayaan kampanye, akses kepada pejabat, penyediaan lapangan kerja, kepemilikan media, lobi, dukungan kepada kandidat, atau jaringan sosial. Di dalam demokrasi elektoral, perlindungan kekayaan dapat dicapai melalui kompetisi, koalisi, negosiasi, atau pengaruh atas rancangan aturan. Pada bentuk rezim lain, perlindungan itu dapat mengandalkan aparat koersif atau hubungan

patronase. Intinya adalah kapasitas mengamankan kekayaan, bukan seragam kelembagaan yang sama di setiap negara.

Pendekatan lain, terutama karya Richard Robison dan Vedi Hadiz, menekankan relasi historis antara kelas, negara, modal, dan jaringan politik. Dalam analisis mereka mengenai Indonesia, oligarki bukan semata daftar orang kaya, melainkan struktur hubungan yang terbentuk di bawah Orde Baru dan mengalami reorganisasi setelah perubahan rezim. Ketika demokratisasi dan liberalisasi pasar berlangsung, kelompok lama tidak serta-merta lenyap; mereka beradaptasi, membangun aliansi baru, masuk ke partai, memengaruhi lembaga daerah, atau menggunakan aturan pasar dan negara yang berubah (Robison & Hadiz, 2004, 2013).

Perbedaan di antara para ahli mencerminkan perbedaan pertanyaan penelitian. Winters menyoroti perlindungan kekayaan dan kapasitas material. Robison dan Hadiz menekankan formasi sosial-politik serta kesinambungan jaringan dan kepentingan kelas. Michels menelaah kecenderungan pemusatan kendali di dalam organisasi. Kerangka-kerangka ini dapat saling melengkapi jika peneliti menjelaskan apa yang hendak diterangkan: aktor pemilik kekayaan, struktur koalisi, atau dinamika kepemimpinan. Menggabungkannya secara serampangan justru dapat menghasilkan konsep yang terlalu luas.

4. Apa yang Dimaksud dengan Oligarki

Untuk tujuan artikel ini, oligarki dapat didefinisikan sebagai pola kekuasaan ketika sumber daya yang sangat terkonsentrasi memberi kelompok kecil kemampuan berulang dan tidak seimbang untuk memengaruhi keputusan kolektif serta melindungi kepentingan materialnya, sementara mekanisme akuntabilitas dan penyeimbang tidak cukup kuat untuk membatasi pengaruh tersebut. Definisi ini menggabungkan tiga unsur. Pertama, terdapat konsentrasi sumber daya yang nyata. Kedua, sumber daya itu dapat dikonversi menjadi pengaruh terhadap keputusan. Ketiga, pengaruhnya

bertahan atau berulang dan menghasilkan keistimewaan dibandingkan kemampuan warga pada umumnya.

Definisi itu membedakan oligarki sebagai struktur kekuasaan dari "oligark" sebagai sebutan bagi aktor individual. Sebuah negara dapat memiliki banyak orang kaya tanpa seluruh kekayaan mereka berubah menjadi kekuasaan politik. Sebaliknya, beberapa aktor dengan kekayaan yang tidak paling besar dapat memperoleh pengaruh luar biasa melalui monopoli informasi, jaringan keamanan, kendali organisasi, atau akses eksklusif ke institusi. Penelitian seharusnya menerangkan jalur pengaruh itu, bukan membuat inferensi otomatis dari besarnya harta.

Oligarki juga bukan sekadar fakta bahwa suatu keputusan disepakati oleh sedikit pejabat. Hampir semua pemerintahan membutuhkan delegasi dan pembagian kerja. Keputusan teknis oleh kabinet atau badan regulator tidak otomatis oligarkis, sepanjang mereka bekerja di bawah mandat publik, aturan transparan, pemeriksaan hukum, pengawasan parlemen, dan mekanisme untuk memperbaiki keputusan. Yang perlu ditanyakan ialah apakah kelompok tertentu secara sistematis memiliki akses dan daya tawar yang tidak tersedia bagi kelompok lain, serta apakah keistimewaan itu melayani kepentingan terbatas dan sulit dikoreksi.

Kata "pola" penting karena kekuasaan oligarkis jarang terlihat melalui satu transaksi saja. Hubungan dapat muncul pada rangkaian keputusan yang saling menguatkan: akses istimewa terhadap kontrak, pengecualian pajak, hambatan bagi pesaing, aturan yang menguntungkan perusahaan tertentu, penegakan hukum yang selektif, dan kendali atas komunikasi publik. Setiap keputusan mungkin mempunyai alasan administratif tersendiri. Analisis perlu menilai pola, proses, aktor, serta hasil bersama-sama sebelum menyimpulkan adanya dominasi yang sistematis.

Definisi kerja ini juga menuntut pembedaan antara pengaruh yang sah dan pengaruh yang mendistorsi kesetaraan politik. Organisasi masyarakat sipil,

asosiasi bisnis, serikat pekerja, dan kelompok advokasi semuanya berusaha memengaruhi kebijakan. Perbedaan pengaruh adalah hal normal dalam masyarakat plural. Masalah oligarkis muncul ketika kesenjangan sumber daya mengubah akses yang legal menjadi dominasi yang berulang, ketika saluran pengaruh tidak transparan, atau ketika institusi publik tidak mampu menyeimbangkan kepentingan kelompok yang memiliki daya material jauh lebih besar.

5. Oligarki dan Konsep yang Berdekatan

5.1 Oligarki dan elite

Elite adalah istilah luas bagi kelompok yang menempati posisi penting atau memiliki pengaruh besar dalam suatu bidang, misalnya elite politik, birokrasi, militer, akademik, agama, ekonomi, atau kebudayaan. Tidak semua elite bersifat oligarkis. Seorang ilmuwan terkemuka, pemimpin organisasi profesi, atau pejabat senior dapat menjadi bagian elite tanpa memiliki kekayaan besar ataupun berupaya mempertahankan kekayaan melalui pengaruh politik. Oligarki lebih spesifik: ia menyoroti konsentrasi kekuasaan dan kaitannya dengan kepentingan material serta lemahnya penyeimbang. Elite menjawab pertanyaan “siapa yang berada di puncak?”, sedangkan analisis oligarki menanyakan “bagaimana kekuasaan terkonsentrasi itu bekerja, siapa yang diuntungkan, dan bagaimana ia dibatasi?”.

5.2 Oligarki dan plutokrasi

Plutokrasi berarti pemerintahan atau dominasi oleh orang kaya. Istilah ini sering digunakan ketika kekayaan secara langsung menjadi dasar hak politik atau ketika pemilik modal secara nyata mengendalikan pemerintahan. Oligarki dapat beririsan dengan plutokrasi, tetapi keduanya tidak identik. Oligarki tidak selalu berarti orang kaya memegang jabatan; kekayaan dapat memengaruhi agenda atau keputusan dari luar lembaga formal. Sebaliknya, pemerintahan oleh kelompok kecil dapat didasarkan pada militer, keluarga,

partai, atau birokrasi, bukan semata-mata kekayaan. Plutokrasi menonjolkan dominasi kelas kaya, sementara oligarki menyoroti struktur kekuasaan oleh kelompok kecil dan mekanisme perlindungan kepentingannya.

5.3 Oligarki dan otoritarianisme

Otoritarianisme adalah corak rezim yang membatasi kompetisi politik dan kebebasan warga, biasanya melalui pemusatan kewenangan, pembatasan oposisi, atau lemahnya akuntabilitas. Oligarki bukan nama lain bagi otoritarianisme. Sebuah rezim otoriter dapat dikuasai seorang pemimpin, partai tunggal, militer, atau koalisi kecil, dan sebagian dari struktur itu mungkin bekerja untuk melindungi kekayaan kelompok. Oligarki juga dapat beroperasi dalam demokrasi elektoral ketika pemilu berlangsung tetapi kemampuan memengaruhi proses dan hasil sangat timpang. Maka, demokrasi dan oligarki tidak selalu merupakan kategori yang saling meniadakan; keduanya bisa hadir bersama dalam tegangan.

5.4 Oligarki dan kleptokrasi

Kleptokrasi menggambarkan pemerintahan yang menggunakan kekuasaan publik untuk mengambil atau mengalihkan kekayaan negara bagi keuntungan pribadi atau jaringan penguasa. Korupsi dapat menjadi mekanisme oligarkis apabila digunakan untuk melanggengkan pengaruh kelompok kecil, tetapi tidak setiap tindak korupsi merupakan bukti oligarki. Suap satu pejabat untuk mempercepat izin adalah tindakan koruptif; pola sistematis ketika jaringan bisnis-politik mengatur kebijakan dan penegakan hukum demi mempertahankan dominasi memerlukan penjelasan tambahan. Oligarki berkaitan dengan distribusi dan penggunaan kuasa; kleptokrasi lebih langsung menunjuk pada perampasan sumber daya publik.

5.5 Oligarki dan ketimpangan ekonomi

Ketimpangan adalah perbedaan distribusi pendapatan, kekayaan, kesempatan, atau akses. Ia dapat menjadi kondisi yang memudahkan

munculnya oligarki, karena ketimpangan menciptakan sumber daya politik yang tidak seimbang. Namun, ketimpangan saja belum membuktikan terjadinya oligarki. Peneliti harus menunjukkan bagaimana sumber daya yang timpang diubah menjadi pengaruh dan bagaimana institusi gagal menyeimbangkannya. Masyarakat dengan kekayaan yang timpang tetapi memiliki pers, pengadilan, kompetisi pasar, partai, serikat, dan transparansi yang efektif mungkin membatasi penerjemahan kekayaan menjadi dominasi politik. Sebaliknya, konsentrasi aset yang tinggi dan lembaga penyeimbang yang lemah dapat menciptakan risiko lebih besar.

5.6 Oligarki dan kapitalisme

Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang bertumpu pada kepemilikan privat, produksi komoditas, pasar, investasi, dan akumulasi modal dalam berbagai variasi kelembagaan. Kapitalisme tidak otomatis berarti oligarki; sistem kapitalis dapat memiliki persaingan, regulasi, pajak progresif, kebijakan antimonopoli, dan mekanisme demokratis yang membatasi dominasi. Namun, akumulasi yang menghasilkan konsentrasi modal ekstrem dapat memberi pemilik modal kapasitas besar untuk membentuk aturan. Pertanyaan analitisnya bukan apakah negara memiliki pasar, melainkan siapa yang menguasai pasar, bagaimana aturan dibuat, dan apakah kepentingan publik mampu mengoreksi kekuatan ekonomi privat.

6. Mekanisme Oligarki dalam Kehidupan Politik dan Ekonomi

Mekanisme pertama adalah pembiayaan politik. Pemilihan umum memerlukan dana untuk organisasi, komunikasi, perjalanan, saksi, teknologi, dan mobilisasi. Ketika biaya kompetisi tinggi dan aturan pembiayaan kurang transparan, kandidat serta partai dapat bergantung pada penyandang dana besar. Ketergantungan itu tidak selalu menghasilkan transaksi quid pro quo yang eksplisit; ia dapat menciptakan kesamaan prioritas, akses istimewa, atau pertimbangan bahwa kepentingan donor perlu diperhitungkan. Untuk

membuktikan pengaruh, peneliti perlu menghubungkan sumber dana dengan proses pengambilan keputusan, bukan hanya menampilkan daftar donatur.

Mekanisme kedua adalah hubungan personal dan patronase. Jaringan dapat menghubungkan pejabat, pemilik perusahaan, kontraktor, pengurus partai, birokrat, dan tokoh lokal melalui hubungan keluarga, pendidikan, bisnis, atau dukungan politik. Jaringan tidak selalu ilegal dan tidak selalu oligarkis. Namun, ketika pengangkatan jabatan, pembagian kontrak, dan perumusan kebijakan secara rutin mengikuti hubungan tertutup, akses universal atas prosedur publik dapat terkikis. Studi jaringan sosial, dokumen kepemilikan, catatan pengadaan, wawancara, dan kronologi keputusan dapat membantu menguji pola tersebut.

Mekanisme ketiga adalah penguasaan atau konsentrasi media dan infrastruktur informasi. Kepemilikan media memberi kapasitas menentukan isu, membingkai perdebatan, dan memberi akses komunikasi kepada kepentingan tertentu. Dalam lingkungan digital, platform, data, dan sistem rekomendasi juga memengaruhi visibilitas. Kepemilikan media tidak otomatis berarti semua pemberitaan dikendalikan pemiliknya; profesionalisme redaksi, regulasi, pluralisme media, dan praktik jurnalistik tetap penting. Analisis perlu menilai struktur kepemilikan, garis editorial, sumber pendapatan, pola pemberitaan, dan hubungan pemilik dengan aktivitas politik atau bisnis lainnya.

Mekanisme keempat adalah kendali atas sumber daya ekonomi strategis. Akses terhadap tanah, mineral, energi, infrastruktur, lisensi, kredit, atau rantai pasok dapat menciptakan kekuatan tawar terhadap negara dan masyarakat. Perusahaan besar dapat mengklaim efisiensi skala, tetapi konsentrasi pasar yang ekstrem dapat mempersulit masuknya pesaing dan meningkatkan ketergantungan negara kepada beberapa pemain. Kebijakan yang memberi hak eksklusif dapat dibenarkan atas dasar investasi atau kepentingan nasional, tetapi perlu pengawasan agar pengecualian tidak berubah menjadi rente permanen.

Mekanisme kelima adalah pembentukan kebijakan dan regulasi. Kelompok yang mempunyai ahli hukum, ekonom, konsultan, asosiasi, dan akses konsultasi dapat mengirimkan informasi teknis secara lebih intensif dibandingkan warga yang tersebar. Kapasitas teknis tersebut dapat membantu negara merancang kebijakan yang lebih baik, tetapi juga berpotensi menghasilkan regulatory capture, yakni keadaan ketika lembaga yang seharusnya mengatur suatu sektor semakin melayani kepentingan pihak yang diaturnya. Indikatornya antara lain pintu putar antara regulator dan industri, konsultasi yang tidak seimbang, pengecualian khusus, serta lemahnya evaluasi dampak distribusional.

Mekanisme keenam adalah penggunaan hukum dan birokrasi. Kelompok kaya biasanya memiliki kemampuan lebih besar untuk menggunakan penasihat hukum, menggugat kebijakan, mengelola kepatuhan, atau menanggung proses panjang. Sementara itu, kelompok berpendapatan rendah mungkin sulit mengakses keadilan. Hukum yang tertulis netral dapat menghasilkan dampak yang tidak setara jika pelaksanaannya selektif atau biaya pemanfaatannya tinggi. Karena itu, studi oligarki sebaiknya memeriksa bukan hanya norma hukum, tetapi juga akses ke proses, konsistensi penegakan, dan kemampuan pihak yang berbeda untuk meminta pertanggungjawaban.

Mekanisme ketujuh adalah pembentukan koalisi. Kelompok berkepentingan yang berbeda dapat bekerja bersama karena mempunyai kepentingan sementara, misalnya menjaga aturan investasi, memperoleh akses proyek, atau mempertahankan kebijakan tertentu. Koalisi oligarkis tidak harus bersatu atau memiliki komando tunggal. Persaingan antarpemilik kekayaan dapat tetap berjalan, bahkan sengit. Pertanyaan pentingnya ialah apakah persaingan tersebut tetap berlangsung di dalam struktur yang secara kolektif membatasi peluang kelompok lain untuk memperoleh akses dan mengubah aturan. Oligarki dapat berupa arena persaingan elite yang tetap menghasilkan keuntungan sistemik bagi kelompok sempit.

7. Oligarki dalam Demokrasi Elektoral

Demokrasi elektoral menyediakan sarana penting bagi warga untuk memilih pemimpin dan mengganti pemerintah. Namun, pemilu tidak dengan sendirinya memastikan kesetaraan pengaruh pada seluruh tahap pemerintahan. Persaingan dapat berlangsung secara kompetitif, tetapi kandidat yang memiliki sumber daya dan jaringan lebih luas mungkin mempunyai visibilitas yang jauh lebih besar. Sesudah pemilihan, pejabat terpilih dapat menghadapi tuntutan dari konstituen, partai, penyandang dana, koalisi parlemen, birokrasi, dan pelaku usaha. Studi oligarki memeriksa bagaimana tuntutan-tuntutan tersebut dibobotkan dalam proses kebijakan.

Kehadiran oligarki dalam demokrasi dapat disebut sebagai persoalan kualitas demokrasi, bukan bukti bahwa prosedur demokratis tidak ada sama sekali. Pemilu dapat sah, partisipasi dapat berlangsung, oposisi dapat menang di beberapa wilayah, dan masyarakat sipil dapat berorganisasi; pada saat yang sama, kebijakan tertentu mungkin lebih responsif kepada kelompok dengan sumber daya besar. Karena itu, penilaian perlu menghindari dua ekstrem: menganggap semua institusi demokratis sudah cukup untuk menjamin kesetaraan, atau menyatakan demokrasi sepenuhnya palsu hanya karena pengaruh ekonomi tidak setara.

Konsep “demokrasi oligarkis” atau “oligarki elektoral” sering dipakai untuk menunjukkan koeksistensi mekanisme pemilu dengan dominasi kelompok sempit. Istilah ini harus disertai definisi operasional. Penulis sebaiknya menyebut dimensi demokrasi yang masih berjalan, dimensi yang dibatasi, aktor yang memperoleh keistimewaan, saluran pengaruh yang digunakan, dan kebijakan yang terpengaruh. Dengan rincian itu, pembaca dapat memahami apakah klaim merujuk pada persaingan partai, pembiayaan kampanye, struktur kepemilikan, konsultasi kebijakan, atau ketidaksetaraan pelaksanaan hukum.

Selain itu, oligarki tidak selalu identik dengan koordinasi rahasia. Kepentingan dapat selaras tanpa konspirasi. Pemilik perusahaan mungkin mendukung kebijakan pajak rendah karena kepentingan bisnis, sementara para legislator menganggap kebijakan itu mempercepat investasi. Kesamaan hasil dapat muncul melalui norma profesi, struktur ketergantungan ekonomi, akses berulang, atau keyakinan bersama. Penelitian yang baik membedakan antara bukti koordinasi langsung dan bukti pengaruh struktural. Klaim tentang motif, komunikasi, atau persekongkolan memerlukan bukti yang lebih kuat daripada temuan tentang pola kebijakan yang menguntungkan suatu kelompok.

8. Perkembangan Oligarki di Indonesia: Sejarah dan Transformasi

Pembahasan oligarki Indonesia memerlukan penempatan historis. Orde Baru membangun negara yang kuat dengan pemusatan kewenangan, kendali politik, dan hubungan dekat antara penguasa, birokrasi, militer, serta kelompok usaha. Perizinan, kontrak, monopoli, kredit, dan akses terhadap pasar tertentu berperan dalam membentuk hubungan antara kekuasaan negara dan akumulasi modal. Robison dan Hadiz menelusuri pembentukan kelas dan jaringan yang tumbuh dalam struktur tersebut, termasuk hubungan antara kepentingan bisnis, negara, dan aliansi politik (Robison & Hadiz, 2004).

Perubahan 1998 membuka ruang kompetisi elektoral, kebebasan pers, desentralisasi, dan reorganisasi partai. Pergeseran kelembagaan ini penting dan tidak boleh direduksi sebagai kosmetik. Namun, perubahan rezim tidak serta-merta menghapus modal, perusahaan, jaringan, atau pengalaman organisasi yang telah terakumulasi. Sebagian aktor lama beradaptasi dengan lingkungan baru; sebagian aktor baru memasuki politik; dan sebagian kepentingan bisnis membangun hubungan pada tingkat pusat maupun daerah. Karena itu, pendekatan historis meneliti sekaligus perubahan dan kesinambungan.

Winters menggarisbawahi bahwa kekayaan material di Indonesia sangat terkonsentrasi dibandingkan dengan sumber daya politik lain. Dalam

analisisnya pada 2013, ia berpendapat bahwa kesenjangan material memberi oligark kapasitas untuk melakukan pertahanan kekayaan dan bahwa lemahnya infrastruktur hukum serta terbatasnya organisasi penyeimbang dapat membuat pengaruh material menjadi dominan (Winters, 2013). Angka yang ia gunakan menggambarkan periode dan metodologi tertentu; angka tersebut tidak boleh dikutip sebagai ukuran mutakhir tanpa pembaruan data. Nilai konseptualnya adalah menunjukkan bagaimana konsentrasi sumber daya dapat dibandingkan dan dikaitkan dengan akses politik.

Setelah Reformasi, pemilu langsung meningkatkan kebutuhan kampanye dan memperluas arena persaingan. Desentralisasi juga memindahkan sebagian kewenangan ke pemerintah daerah, sehingga hubungan antara bisnis dan politik tidak hanya berlangsung di tingkat nasional. Pengusaha, pejabat daerah, partai, dan aktor lokal dapat membentuk hubungan baru di sekitar sumber daya dan proyek. Dalam beberapa konteks, kedekatan tersebut mendukung investasi atau pelayanan; dalam konteks lain, dapat menciptakan konflik kepentingan dan pembagian rente. Penjelasan harus berbasis kasus, bukan generalisasi bahwa semua pemerintah daerah atau semua pengusaha bertindak seragam.

Media menjadi ranah penting karena pemilikan usaha dapat beririsan dengan kepentingan politik. Ketika pemilik memiliki kepentingan lintas sektor, media dapat berfungsi sekaligus sebagai perusahaan, saluran pembentuk opini, dan sumber daya dalam kompetisi politik. Akan tetapi, analisis yang bertanggung jawab tidak menyimpulkan bahwa setiap produk media merupakan propaganda. Ia perlu memeriksa pemilik manfaat, struktur grup, independensi redaksi, distribusi sumber pendapatan, dan perbedaan perlakuan terhadap aktor politik. Pluralisme kepemilikan dan transparansi adalah faktor penyeimbang yang relevan.

Politik Indonesia juga memiliki keragaman aktor dan konflik. Pemilih dapat menolak kandidat yang didukung elite, gerakan masyarakat dapat memengaruhi isu, pengadilan dan lembaga pengawas dapat menghasilkan

keputusan yang berbeda dari kepentingan pemodal, sementara kompetisi antarelite dapat membuka celah bagi reformasi. Analisis oligarki yang hanya melihat dominasi dan mengabaikan kontestasi akan memberi gambaran terlalu statis. Sebaliknya, analisis yang hanya merayakan pemilu tanpa memeriksa distribusi sumber daya dapat gagal melihat batas substantif partisipasi. Kedua sisi perlu dianalisis bersama.

Dalam kajian Indonesia, istilah oligarki berguna ketika peneliti dapat menunjukkan bagaimana hubungan ekonomi-politik melintasi perubahan rezim dan beradaptasi dengan institusi baru. Ia lebih kuat daripada sekadar "politik uang" karena dapat memetakan struktur kekayaan, jaringan, kebijakan, dan kapasitas perlindungan aset. Ia juga lebih terarah daripada menyebut seluruh elite sebagai satu kelompok homogen. Namun, kerangka ini harus diuji terhadap variasi: sektor, wilayah, periode, jenis rezim, serta bentuk kekayaan. Tidak semua aktor berpengaruh memiliki kepentingan yang sama, dan tidak semua kebijakan negara merupakan produk dominasi oligarkis.

9. Bagaimana Mengidentifikasi Pengaruh Oligarkis

Identifikasi sebaiknya dimulai dengan pertanyaan penelitian yang sempit. Sebagai contoh: bagaimana pembiayaan kampanye memengaruhi keputusan tata ruang di suatu daerah? Apakah struktur kepemilikan media berkaitan dengan perubahan pola pemberitaan selama pemilu? Apakah aturan lisensi di sektor tertentu meningkatkan hambatan masuk bagi pesaing baru? Pertanyaan spesifik membantu menentukan data dan mengurangi kecenderungan menggunakan oligarki sebagai penjelasan menyeluruh untuk segala masalah politik.

Tahap pertama adalah memetakan distribusi sumber daya. Data yang relevan dapat meliputi kepemilikan manfaat perusahaan, konsentrasi pasar, kepemilikan tanah, kontrak pengadaan, kontribusi politik, hubungan keluarga atau bisnis, serta aset strategis. Data kekayaan sering tidak lengkap dan tidak

selalu terbuka, sehingga peneliti harus menjelaskan batasannya. Indikator konsentrasi tidak boleh hanya berdasarkan kekayaan nominal, tetapi perlu menilai jenis sumber daya dan kemampuannya dikonversi menjadi pengaruh dalam konteks yang diteliti.

Tahap kedua adalah melacak saluran pengaruh. Peneliti dapat menelaah pertemuan, konsultasi, korespondensi, pembiayaan, dokumen penyusunan regulasi, pintu putar, posisi dalam organisasi, pola dukungan publik, dan hubungan antara rancangan kebijakan dengan kepentingan yang mendapat keuntungan. Wawancara dapat membantu memahami proses informal, tetapi perlu ditriangulasi dengan dokumen dan data lain. Klaim bahwa seorang aktor "mengendalikan" keputusan harus dibedakan dari klaim yang lebih terbatas, seperti memiliki akses lebih besar atau mampu memengaruhi agenda.

Tahap ketiga adalah menguji hasil dan distribusi manfaat. Apakah kebijakan meningkatkan keuntungan kelompok tertentu, memperkuat hambatan pesaing, mengalihkan biaya kepada publik, atau melemahkan alternatif kebijakan? Analisis dampak tidak otomatis membuktikan sebab. Kebijakan yang menguntungkan perusahaan dapat juga muncul karena kebutuhan investasi, efisiensi, atau pertimbangan teknis yang sah. Peneliti perlu membandingkan penjelasan alternatif, menelusuri proses, serta menguji apakah hasil yang sama akan terjadi tanpa keterlibatan aktor yang diteliti.

Tahap keempat adalah menilai mekanisme penyeimbang. Apakah parlemen, pengadilan, regulator, media, serikat, asosiasi warga, dan lembaga audit mampu memeriksa keputusan? Apakah warga dapat mengakses informasi dan mengajukan keberatan? Pengaruh kaya yang besar mungkin tetap dibatasi oleh institusi kuat. Sebaliknya, dominasi dapat bertahan bukan hanya karena sumber daya aktor, tetapi juga karena kelemahan organisasi tandingan dan biaya partisipasi yang tinggi. Dimensi penyeimbang ini membantu membedakan keunggulan biasa dari dominasi yang sulit dikoreksi.

Tahap kelima adalah membandingkan waktu dan kasus. Pola yang hanya terjadi sekali mungkin menunjukkan keputusan buruk, korupsi, atau kegagalan kebijakan, tetapi belum tentu memperlihatkan struktur oligarkis. Pengamatan lintas waktu memungkinkan peneliti menilai apakah akses dan keuntungan berulang, apakah aktor yang sama terus mendapat manfaat, dan apakah pergantian pemerintahan mengubah struktur tersebut. Perbandingan antarwilayah atau sektor dapat menunjukkan apakah mekanisme itu umum atau bergantung pada kondisi tertentu.

Triangulasi metode memperkuat kesimpulan. Analisis jaringan dapat memetakan hubungan aktor; analisis isi dapat mengukur representasi dalam media atau dokumen; studi proses kebijakan dapat mengurutkan keputusan; analisis hukum dapat memeriksa rancangan dan pengecualian; data kuantitatif dapat membandingkan distribusi aset serta hasil. Tidak ada satu metode yang cukup untuk menjelaskan seluruh fenomena. Peneliti juga perlu menyatakan definisi oligarki yang dipakai karena studi yang meneliti kepemimpinan organisasi akan memerlukan indikator berbeda dari studi pertahanan kekayaan oleh pemilik modal.

10. Contoh Naratif Penggunaan Istilah

Bayangkan sebuah daerah yang akan membangun kawasan industri. Pemerintah membuka konsultasi publik dan menerbitkan rencana tata ruang. Beberapa perusahaan besar menghadiri rapat awal, mengajukan masukan teknis, dan pada akhirnya memperoleh konsesi lahan. Di sisi lain, kelompok petani dan warga sekitar mengetahui rencana itu setelah rancangan hampir disahkan. Keadaan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang kesetaraan akses, tetapi belum cukup untuk memastikan oligarki. Mungkin pemerintah memang memerlukan informasi teknis dan perusahaan memenuhi kriteria terbuka. Untuk menilai kasus, peneliti perlu mengetahui siapa pemilik manfaat perusahaan, bagaimana konsultasi dijalankan, alternatif apa yang

dipertimbangkan, bagaimana keputusan berubah setelah lobi, dan apakah proses keberatan masyarakat efektif.

Jika dokumen menunjukkan bahwa satu kelompok usaha berulang kali memperoleh pengecualian, menguasai sebagian besar konsesi, membiayai kandidat yang mengesahkan perubahan aturan, dan memiliki akses yang tidak tersedia bagi warga atau pesaing, sementara lembaga pengawas gagal memeriksa konflik kepentingan, maka klaim pengaruh oligarkis menjadi lebih masuk akal. Bahkan dalam situasi itu, penulis sebaiknya menjelaskan tingkat kepastian dan mekanisme yang ditemukan. Istilah oligarki menyatukan sejumlah relasi, tetapi analisis tetap harus menunjukkan jejak empirisnya.

Contoh lain ialah sebuah partai yang dibentuk untuk memperluas keterwakilan masyarakat. Pada awalnya keputusan dibahas di kongres terbuka. Namun, seiring membesarnya organisasi, sekelompok kecil pengurus mengendalikan pencalonan, anggaran, komunikasi internal, dan informasi anggota. Jika para pemimpin mempertahankan kekuasaan melalui kontrol terhadap sumber daya organisasi dan membuat mekanisme pergantian tidak efektif, konsep oligarki organisasi dapat digunakan. Dalam kasus ini, penekanan tidak terletak pada kekayaan para pengurus, melainkan pada pemusatan kendali dan kesulitan anggota mengoreksi keputusan, sejalan dengan pertanyaan yang dibuka Michels.

Pada tingkat kebijakan nasional, suatu undang-undang dapat memberi keuntungan kepada sektor tertentu. Untuk menilai apakah itu cerminan oligarki, peneliti harus membedakan tiga hal: isi kebijakan, proses pembentukannya, dan struktur pengaruh yang melatarbelakanginya. Kebijakan pro-industri dapat dibenarkan karena penciptaan kerja atau kepentingan strategis. Namun, bila proses tertutup, bukti teknis tidak seimbang, pengawasan konflik kepentingan lemah, dan manfaat terkonsentrasi sementara biaya sosial dialihkan, analisis oligarki dapat membantu menjelaskan hubungan kuasa yang lebih luas. Istilah ini tidak

menggantikan analisis ekonomi manfaat-biaya, tetapi menambah pertanyaan tentang siapa yang memiliki suara dan siapa yang menanggung risiko.

11. Batasan dan Kritik terhadap Konsep

Kritik utama terhadap istilah oligarki ialah definisinya dapat terlalu luas. Jika semua kelompok kuat disebut oligarkis, konsep kehilangan daya pembeda. Jawabannya bukan menghindari istilah, melainkan menetapkan batas: kelompok mana yang diteliti, sumber daya apa yang dikuasai, melalui mekanisme apa pengaruh berlangsung, dalam keputusan mana pengaruh tampak, serta kondisi apa yang dapat menyangkal dugaan tersebut. Konsep yang baik harus memungkinkan peneliti menemukan bahwa suatu kasus ternyata tidak oligarkis.

Kritik kedua adalah kecenderungan mempersonalisasi struktur. Perhatian berlebihan pada nama-nama orang kaya dapat menyederhanakan proses yang melibatkan institusi, aturan, insentif, dan relasi kelas. Penelitian yang hanya menyusun daftar pemilik kekayaan belum menerangkan cara kerja kekuasaan. Bahkan aktor dapat berganti sementara struktur akses dan kebijakan tetap bertahan. Karena itu, biografi aktor perlu dipadukan dengan studi lembaga, jaringan, proses kebijakan, pasar, dan distribusi manfaat.

Kritik ketiga adalah bahaya konspirasionisme. Ketimpangan hasil atau kesamaan kepentingan tidak dengan sendirinya membuktikan koordinasi rahasia. Dalam beberapa keadaan, pelaku memiliki insentif serupa dan aturan yang ada secara otomatis menguntungkan mereka, tanpa adanya pertemuan tersembunyi. Menyebut adanya persekongkolan memerlukan bukti komunikasi atau tindakan koordinatif. Jika bukti itu tidak tersedia, penulis dapat menggunakan istilah yang lebih terukur seperti “akses istimewa”, “pengaruh yang tidak seimbang”, “konsentrasi kepemilikan”, atau “koalisi kepentingan”.

Kritik keempat menyoroti peran demokrasi, masyarakat sipil, dan mobilisasi publik yang dapat mengubah hubungan kuasa. Oligarki bukan kondisi yang

sepenuhnya tidak dapat diganggu. Pemilu, jurnalisme investigatif, protes, litigasi, pengorganisasian pekerja, regulasi persaingan, serta transparansi kepemilikan dapat membatasi pengaruh terkonsentrasi. Karena itu, analisis perlu mencakup respons warga dan institusi, bukan hanya kekuatan kelompok dominan. Kemampuan menantang pengaruh juga dapat berbeda menurut sektor, wilayah, dan periode.

Kritik kelima adalah kemungkinan menggunakan istilah untuk mendelegitimasi lawan politik tanpa pemeriksaan. Dalam debat publik, "oligarki" dapat menjadi label moral yang kuat. Label semacam itu memerlukan tanggung jawab lebih besar karena dapat merusak reputasi atau menghambat diskusi substantif. Dalam tulisan akademik, tuduhan harus dibedakan dari inferensi. Penulis perlu menyebutkan bukti yang tersedia, batas data, dan apakah kesimpulannya bersifat deskriptif, kausal, atau normatif. Ketelitian ini bukan melemahkan kritik; justru membuat kritik dapat diuji dan lebih meyakinkan.

12. Implikasi bagi Demokrasi, Kebijakan, dan Manajemen Publik

Apabila konsentrasi kekayaan dapat berubah menjadi pengaruh politik yang tidak seimbang, maka agenda reformasi perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Keterbukaan pemilik manfaat perusahaan, pelaporan pembiayaan politik, deklarasi konflik kepentingan, publikasi konsultasi regulasi, dan akses terhadap data pengadaan dapat membuat hubungan yang sebelumnya tidak terlihat menjadi dapat diperiksa. Keterbukaan bukan solusi tunggal, tetapi menjadi prasyarat bagi jurnalis, peneliti, parlemen, dan masyarakat untuk menilai keputusan publik.

Kedua, lembaga pengawas memerlukan kapasitas dan independensi. Regulator yang kekurangan ahli, anggaran, atau perlindungan dari tekanan politik sulit mengawasi industri yang memiliki sumber daya besar. Penguatan persaingan usaha, audit publik, pengadilan yang dapat diakses, pemeriksaan konflik kepentingan, serta perlindungan pelapor dapat memperbaiki

penyeimbang. Desain lembaga harus memperhatikan kemungkinan pintu putar, ketergantungan data pada perusahaan, dan proses konsultasi yang terlalu berat sebelah.

Ketiga, demokrasi substantif membutuhkan organisasi warga yang mampu bertahan. Serikat pekerja, asosiasi konsumen, organisasi profesi, kelompok lingkungan, lembaga bantuan hukum, dan organisasi masyarakat lokal dapat mengagregasi suara yang tersebar. Mereka tidak selalu sepakat satu sama lain, namun keberagaman organisasi memungkinkan kepentingan publik yang berbeda memperoleh representasi. Akses informasi, pendidikan kewargaan, pendanaan yang independen, dan kebebasan berserikat memperkuat kapasitas tersebut.

Keempat, kebijakan ekonomi perlu menjaga kompetisi yang adil. Aturan antimonopoli, keterbukaan tender, pengurangan hambatan masuk yang tidak perlu, evaluasi subsidi, dan penilaian distribusi manfaat dapat mengurangi kemungkinan terbentuknya rente eksklusif. Pada saat yang sama, investasi besar dan proyek strategis memerlukan kepastian aturan. Tujuannya bukan menolak pelaku usaha besar, melainkan memastikan bahwa skala ekonomi tidak berubah menjadi hak istimewa permanen yang menutup kesempatan bagi masyarakat dan pesaing.

Bagi manajemen publik, konsep oligarki mendorong pemetaan pemangku kepentingan yang lebih kritis. Analisis stakeholder tidak cukup hanya mencatat pihak yang memiliki minat dan pengaruh; perlu ditanyakan sumber pengaruh, siapa yang tidak terwakili, siapa yang menetapkan agenda, dan siapa yang menanggung biaya keputusan. Pemerintah dapat menggunakan penilaian dampak distribusional, konsultasi yang inklusif, audit jejak kebijakan, serta mekanisme umpan balik untuk mengurangi ketimpangan suara. Dalam organisasi, tata kelola yang transparan, pembatasan masa jabatan, akses anggota terhadap informasi, dan mekanisme banding dapat mencegah kendali tertutup.

Bagi pendidikan tinggi, oligarki dapat dijadikan tema lintas disiplin. Mahasiswa politik dapat memetakan jaringan dan institusi; mahasiswa ekonomi menelaah konsentrasi pasar dan distribusi aset; mahasiswa hukum memeriksa konflik kepentingan dan kepastian prosedural; mahasiswa manajemen mengkaji tata kelola organisasi dan pengambilan keputusan; mahasiswa komunikasi menilai struktur kepemilikan media. Pendekatan lintas disiplin membantu mencegah reduksi masalah menjadi sekadar moralitas personal atau angka ketimpangan.

13. Pedoman Praktis Menulis dan Menggunakan Kata Oligarki

Dalam penulisan ilmiah, istilah oligarki sebaiknya didefinisikan pada awal pembahasan. Penulis perlu menyebut tradisi teori yang digunakan dan batas penerapannya. Jika mengikuti pendekatan Winters, jelaskan fokus pada aktor kaya dan pertahanan kekayaan. Jika mengikuti Robison dan Hadiz, uraikan pembentukan historis jaringan dan relasi ekonomi-politik. Jika membahas organisasi, jelaskan bahwa fokusnya ialah pemusatan kendali dan dinamika kepemimpinan. Penyebutan teori menjadikan istilah dapat dibandingkan dan dikritik secara terbuka.

Gunakan kata sifat “oligarkis” untuk menjelaskan mekanisme atau struktur, bukan untuk mengganti nama kelompok tertentu. Misalnya, “proses pembentukan regulasi menunjukkan akses yang tidak seimbang dan berulang bagi perusahaan dominan” lebih informatif daripada “regulasi ini adalah hasil oligarki”, jika mekanismenya belum dibuktikan. Jika bukti sudah kuat, penulis dapat menyimpulkan bahwa proses tersebut memiliki ciri oligarkis sambil menjelaskan indikator yang mendasarinya.

Hindari menyamakan kekayaan dengan kesalahan moral. Kekayaan dapat berasal dari inovasi, usaha, warisan, lisensi, atau berbagai proses lain; pertanyaan ilmiahnya adalah bagaimana kekayaan diperoleh, bagaimana pengaruh digunakan, dan apakah aturan memungkinkan akumulasi yang adil. Demikian juga, pengusaha tidak boleh diperlakukan sebagai kelompok

tunggal. Perusahaan dapat bersaing, berbeda pandangan, atau justru mendukung regulasi yang membatasi monopoli. Analisis harus memperhatikan variasi aktor serta konflik kepentingan yang nyata.

Nyatakan ukuran waktu dan sumber data secara jelas. Data kekayaan, kepemilikan, pembiayaan, dan lobi dapat berubah cepat serta sering tidak lengkap. Angka yang digunakan Winters untuk 2010 atau studi tentang periode Orde Baru tidak otomatis menggambarkan struktur saat ini. Dalam mengutip sumber lama, penulis harus menjelaskan apakah sumber tersebut dipakai untuk teori, sejarah, atau kondisi kontemporer. Jika mengajukan klaim mutakhir, kumpulkan data mutakhir dan jelaskan metode pengukurannya.

Terakhir, bedakan tiga jenis pernyataan. Pernyataan deskriptif menjelaskan konsentrasi atau pola akses. Pernyataan kausal menyatakan bahwa konsentrasi tersebut memengaruhi keputusan atau hasil; klaim ini memerlukan pelacakan mekanisme dan pengujian penjelasan alternatif. Pernyataan normatif menilai bahwa keadaan itu tidak adil atau merusak demokrasi; penulis perlu menyatakan prinsip nilai yang digunakan. Pemisahan ini membantu pembaca mengerti apakah perdebatan berkaitan dengan fakta, sebab-akibat, atau penilaian moral-politik.

14. Refleksi dan Pertanyaan Diskusi

Oligarki mengajak kita memeriksa hubungan antara kesetaraan warga dan distribusi sumber daya. Hak pilih yang setara memberi dasar normatif demokrasi, namun daya untuk mengorganisasi kepentingan, memperoleh informasi, menjangkau pembuat keputusan, dan memengaruhi kebijakan sangat dipengaruhi oleh modal ekonomi dan sosial. Pertanyaan penting bukan apakah pengaruh dapat dihilangkan sepenuhnya, karena masyarakat plural selalu memiliki kelompok berkepentingan, melainkan bagaimana pengaruh dibuat transparan, dipertanggungjawabkan, dan dapat ditandingi.

Pembahasan juga menunjukkan bahwa perubahan politik tidak selalu menghapus struktur lama secara otomatis. Pergantian rezim, pemilu, atau

reformasi undang-undang dapat membuka peluang baru, tetapi sumber daya dan jaringan dapat menyesuaikan diri. Sebaliknya, kesinambungan tidak berarti bahwa perubahan mustahil. Perlu diteliti kapan institusi baru mengubah perilaku, kapan masyarakat dapat memanfaatkan kompetisi, dan kapan struktur lama kembali memengaruhi aturan. Dengan demikian, konsep oligarki sebaiknya digunakan untuk mengajukan pertanyaan empiris, bukan menutupnya.

Pertanyaan diskusi: (1) Apakah pemilu yang kompetitif cukup untuk menjamin kesetaraan pengaruh politik? Mengapa? (2) Bagaimana membedakan lobi yang sah dari pengaruh oligarkis yang mendistorsi akuntabilitas? (3) Data apa yang diperlukan untuk menilai hubungan antara pembiayaan politik dan keputusan publik di suatu daerah? (4) Apakah konsentrasi kepemilikan media selalu mengurangi pluralisme, dan kondisi apa yang dapat menjadi penyeimbang? (5) Bagaimana perguruan tinggi dan organisasi profesi dapat mencegah pemusatan kendali di dalam institusinya sendiri?

15. Kesimpulan

Oligarki secara historis berakar pada gagasan tentang pemerintahan oleh sedikit orang, tetapi dalam analisis modern istilah ini memiliki makna yang lebih terarah: pola kekuasaan ketika sumber daya terkonsentrasi memungkinkan kelompok kecil memengaruhi keputusan kolektif secara tidak seimbang dan mempertahankan kepentingannya melalui mekanisme yang sulit dikoreksi. Aristoteles menghubungkan oligarki dengan pemerintahan kelompok kaya yang mengejar kepentingannya sendiri; Michels menunjukkan kecenderungan pemusatan kendali dalam organisasi; Winters menekankan politik pertahanan kekayaan; dan Robison serta Hadiz menerangkan formasi historis relasi ekonomi-politik Indonesia.

Oligarki perlu dibedakan dari elite, plutokrasi, otoritarianisme, kleptokrasi, kapitalisme, dan ketimpangan. Konsep-konsep tersebut dapat beririsan, tetapi masing-masing menunjuk aspek yang berbeda. Karena itu, menyebut

seseorang kaya atau berkuasa belum cukup untuk membuktikan oligarki. Bukti yang lebih kuat menunjukkan konsentrasi sumber daya, jalur konversi kekayaan menjadi pengaruh, persistensi keuntungan, dan lemahnya institusi yang dapat mengoreksi dominasi tersebut.

Dalam konteks Indonesia, istilah ini membantu menelaah bagaimana jaringan bisnis-politik yang terbentuk dalam periode sebelumnya beradaptasi dengan demokrasi elektoral dan desentralisasi. Namun, demokrasi Indonesia tidak dapat dipahami hanya sebagai cerita dominasi, karena pemilu, gerakan warga, pers, pengadilan, dan organisasi sosial juga menghasilkan kontestasi serta perubahan. Tugas penelitian adalah mengukur keduanya: kemampuan kelompok kuat mempertahankan kekayaan dan kapasitas institusi publik serta warga membatasi pengaruh itu.

Dengan penggunaan yang cermat, oligarki menjadi alat untuk memperjelas pertanyaan tentang siapa yang mengendalikan sumber daya, bagaimana pengaruh bekerja, siapa yang memperoleh manfaat, dan mekanisme apa yang dapat mengembalikan akuntabilitas. Dengan penggunaan yang longgar, ia hanya menjadi label. Bagi demokrasi dan tata kelola, pembedaan tersebut penting: kritik yang berbasis bukti dapat membuka ruang reformasi, sedangkan tuduhan tanpa indikator hanya menambah kebisingan politik.

Glossarium

Akuntabilitas: Kewajiban pejabat atau lembaga menjelaskan keputusan dan menerima pemeriksaan atau konsekuensi.

Aktor oligark: Aktor yang memiliki sumber daya sangat terkonsentrasi dan kapasitas untuk mempertahankan kekayaan melalui pengaruh politik.

Elite: Kelompok yang menempati posisi atau memiliki pengaruh penting dalam suatu bidang; tidak selalu oligarkis.

Kleptokrasi: Penggunaan kewenangan publik untuk mengambil atau mengalihkan kekayaan negara demi kepentingan pribadi atau jaringan.

Konsentrasi kekayaan: Penumpukan aset atau kekayaan pada bagian kecil dari populasi.

Lobbying: Upaya terorganisasi untuk memengaruhi keputusan pejabat atau lembaga, yang dapat sah jika transparan dan akuntabel.

Oligarki: Pola kekuasaan ketika kelompok kecil dengan sumber daya terkonsentrasi memiliki pengaruh berulang dan tidak seimbang atas keputusan kolektif.

Plutokrasi: Dominasi pemerintahan atau keputusan politik oleh orang kaya sebagai kelompok.

Patronase: Pertukaran dukungan, akses, jabatan, atau sumber daya melalui hubungan personal dan politik.

Regulatory capture: Keadaan ketika regulator semakin melayani kepentingan industri atau pihak yang seharusnya diawasi.

Rente ekonomi: Keuntungan yang diperoleh melalui hak istimewa, hambatan persaingan, atau akses eksklusif, bukan semata peningkatan produktivitas.

Elite capture: Penguasaan program, institusi, atau sumber daya publik oleh elite lokal atau kelompok berpengaruh.

Pintu putar: Perpindahan pejabat antara jabatan publik dan industri terkait, yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Demokrasi elektoral: Sistem dengan pemilihan kompetitif sebagai mekanisme utama memilih pemimpin, tanpa otomatis menjamin kesetaraan substantif.

Triangulasi: Penggunaan lebih dari satu metode, sumber, atau perspektif untuk menguji temuan penelitian.

Daftar Pustaka

Aristotle. (1998). Politics (C. D. C. Reeve, Trans.). Hackett Publishing. (Karya asli diterbitkan sekitar abad ke-4 SM).

Acemoglu, D., Robinson, J. A., & Verdier, T. (2004). Kleptocracy and divide-and-rule: A model of personal rule. Journal of the European Economic Association, 2(2–3), 162–192. https://doi.org/10.1162/154247604323067916

Acemoglu, D., Robinson, J. A., & Torvik, R. (2008). Oligarchic versus democratic societies. Journal of the European Economic Association, 6(1), 1–44. https://doi.org/10.1162/JEEA.2008.6.1.1

Arlen, G. (2019). Aristotle and the problem of oligarchic harm: Insights for democracy. European Journal of Political Theory, 18(3), 393–414. https://doi.org/10.1177/1474885116663837

Case, W. (2006). Reorganizing power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets [Book review]. International Relations of the Asia-Pacific, 6(2), 325–327. https://doi.org/10.1093/irap/lcl003

Hadiz, V. R., & Robison, R. (2013). The political economy of oligarchy and the reorganization of power in Indonesia. Indonesia, 96, 35–57. https://doi.org/10.5728/indonesia.96.0033

Michels, R. (1962). Political parties: A sociological study of the oligarchical tendencies of modern democracy (E. Paul & C. Paul, Trans.). Collier Books. (Karya asli diterbitkan 1911).

Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004). Reorganising power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets. RoutledgeCurzon.

Stanford Encyclopedia of Philosophy. (2022). Aristotle's political theory. https://plato.stanford.edu/entries/aristotle-politics/

Winters, J. A. (2011). Oligarchy. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511793806

Winters, J. A. (2013). Oligarchy and democracy in Indonesia. Indonesia, 96, 11–33. https://doi.org/10.5728/indonesia.96.0099

Winters, J. A., & Page, B. I. (2009). Oligarchy in the United States? Perspectives on Politics, 7(4), 731–751. https://doi.org/10.1017/S1537592709991770

Rhoden, T. F. (2015). Oligarchy in Thailand? The Asia-Pacific Journal, 13(4), Article 1. https://doi.org/10.1177/186810341503400101

Tambunan, D. (2023). The intervention of oligarchy in the Indonesian legislative process. Asian Journal of Comparative Politics, 8(2). https://doi.org/10.1177/20578911231159395

Surikov, I. E. (2024). Aristotle's definition of oligarchy and oligarchic regimes in Athens, 5th–4th centuries BC. Vestnik Drevney Istorii, 84(1), 55–76. https://doi.org/10.31857/S032103910024392-4